



# RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2021 - 2026**



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR **38** TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026 .**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada RPJMD.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan perangkat daerah berupa dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 2

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/ atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai:

- a. pedoman penyusunan Renja PD;
- b. bahan penyusunan rancangan RKPD dan KUA-PPAS.

#### Pasal 4

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas rencana strategis seluruh perangkat daerah;
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 38 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/ atau unsur penunjang urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut maka dilakukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD dalam periode yang sama.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum utama penyusunan Renstra PD antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
  11. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Pembentukan Unit Pelaksana Teknis atau nama lainnya pada Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Dokumen Renstra PD Kabupaten Pematang yang ditetapkan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
7. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
14. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Dinas Lingkungan Hidup;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
19. Dinas Tenaga Kerja;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
21. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Pertanian;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
25. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
26. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
27. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
28. Kecamatan Pematang;
29. Kecamatan Taman;
30. Kecamatan Petarukan;
31. Kecamatan Ampelgading;
32. Kecamatan Comal;
33. Kecamatan Ulujami;
34. Kecamatan Bodeh;
35. Kecamatan Bantarbolang;
36. Kecamatan Randudongkal;
37. Kecamatan Moga;
38. Kecamatan Warungpring;
39. Kecamatan Pulosari;
40. Kecamatan Watukumpul;
41. Kecamatan Belik.

### BAB III PENUTUP

Renstra PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni".

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 dapat tersusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Rencana Strategis ini disusun dengan mempedomani ataupun mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 serta mempedomani kebijakan pemerintah yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 dan Permendagri 86 Tahun 2017. Sementara itu penyusunan Renstra telah dilakukan melalui tahapan analisa lingkungan organisasi (analisa internal), dan analisa di luar lingkungan organisasi (analisa faktor eksternal) yang dikombinasikan dengan analisa isu-isu strategis sehingga dapat ditentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan urusan penanaman modal di Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya Rencana Strategis ini juga akan menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penyusunan Lakip serta program dan kegiatan lainnya yang terkait dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "**TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI**".

Kami menyadari dokumen Revisi Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya. Selanjutnya apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis maka dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator- indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang periode 2021 - 2026.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 ini. Smoga apa yang telah diberikan mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT.

Pemalang, 24 September 2021

**Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Pemalang**



**KHAERON, SH, MM**  
NIP. 19680323 199003 1 012

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i – 1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i – 3</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>i – 5</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>i – 6</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>I – 1</b>
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Landasan Hukum	I – 4
1.3. Maksud dan Tujuan	I – 9
1.3.1. Maksud	I – 9
1.3.2. Tujuan	I – 10
1.4. Sistematika Penulisan	I – 10
<b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DPMPSTSP KABUPATEN PEMALANG</b>	<b>II – 1</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPSTSP Kabupaten Pemalang	II – 1
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	II – 4
2.2.1. Sumberdaya Manusia	II – 4
2.2.2. Sarana Prasarana	II – 15
2.2.2.1. Ruang Pelayanan	II – 15
2.2.2.2. Barang Inventaris	II – 15
2.2.2.3. Sarana Prasarana Pengaduan Saran dan Masukan	II – 18
2.2.2.4. Sarana Prasarana Gerai Investasi	II – 20
2.2.3. Kinerja Pelayanan	II – 20
2.2.3.1. Janji, Kebijakan Mutu dan Motto	II – 20
2.2.3.2. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu	II – 21
2.2.3.3. Capaian Kinerja Pelayanan	II – 22
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Pemalang	II – 39
2.4. Analisis SWOT	II – 40

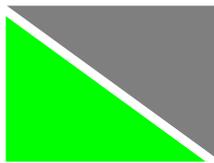
<b>BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>	<b>III – 1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP	III – 1
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III – 3
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III – 7
3.3.1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	III – 7
3.3.2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	III – 8
3.3.3. Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia	III – 8
3.3.4. Peraturan Presiden No 79 Tahun 2020	III – 11
3.3.5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	III – 11
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	III – 12
3.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III – 13
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis	III – 14
<b>BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>IV – 1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang	IV – 1
<b>BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>V – 1</b>
<b>BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>VI – 1</b>
<b>BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>VII – 1</b>
<b>BAB 8 PENUTUP</b>	<b>VIII – 1</b>

## DAFTAR TABEL

2.1.	Sumberdaya Manusia DPMPTSP Kabupaten Pemalang	II – 4
2.2.	Daftar ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan	II – 5
2.3.	Barang Inventaris	II – 16
2.4.	Target dan Realisasi Investasi	II – 22
2.5.	Jenis Perizinan dan Banyaknya Perizinan Yang Telah Diterbitkan	II – 22
2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP	II – 30
2.7.	Capaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan	II – 32
2.8.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II – 39
2.9.	Analisis SWOT	II – 41
3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III – 2
3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	III – 5
3.3.	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	III – 13
4.1.	Tujuan dan Sasaran pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang	IV – 2
5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V – 2
6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	VI – 3
7.1.	Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII – 1

## DAFTAR GAMBAR

1.1.	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan	I – 2
2.1.	Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pemalang	II – 3
2.2.	Mekanisme Pengaduan Masyarakat	II – 9
2.3.	Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat	II – 19



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Agar pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang matang hingga dapat terukur dan terarah atas pencapaian pembangunan yang diinginkan.

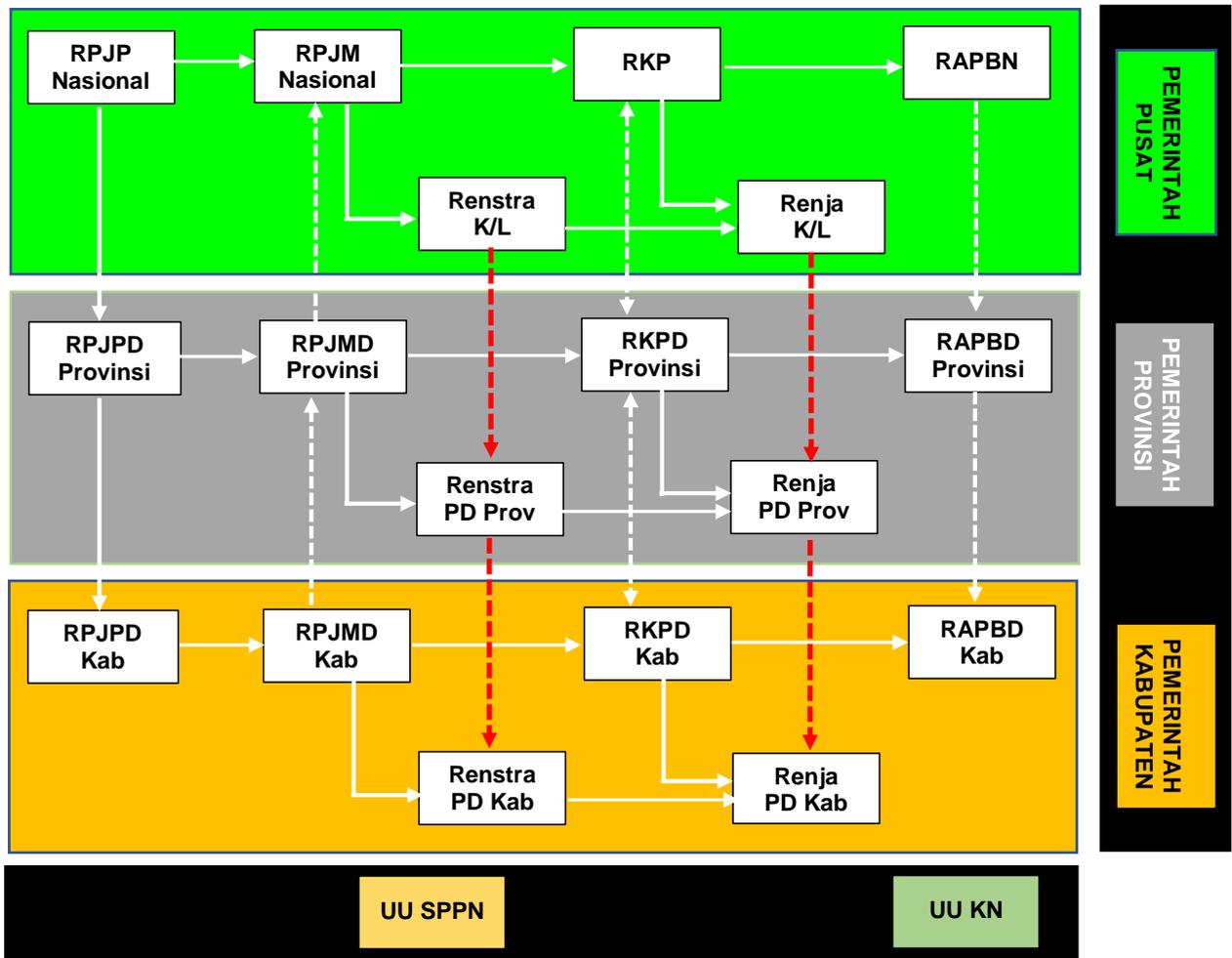
Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Selain itu, Renstra PD juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pelaksana urusan penanaman modal pada Pemerintah Pusat. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

**Gambar 1.1.**

**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan  
 Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan**



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan.

Sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "**TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI**", Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan visi tersebut fokus untuk melaksanakan **misi yang ke 5 (Lima)** yaitu **Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal**. Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. Dengan Program Unggulan yaitu DEWI = Desa Wisata dan KOIN= Kota Industri).

Selanjutnya Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ini dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan tahunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ini menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan arah kebijakan kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang 2021-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

23. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga –Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang –Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi – Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
44. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ( Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 92);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang penanaman modal di Kabupaten Pemalang.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang selama lima tahun.
3. Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan di bidang penanaman modal selama periode 2021-2026.
4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar fungsi OPD maupun antara Pusat dan Daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disajikan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN PEMALANG**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP
- 2.2. Sumberdaya DPMPTSP
- 2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- 2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan pelayanan DPMPTSP

#### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP KABUPATEN PEMALANG**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang

- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaah Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

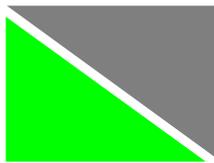
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Pemalang

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII. PENUTUP**



## **BAB 2**

# **GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN PEMALANG**

### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP KABUPATEN PEMALANG**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang penanaman modal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugasnya yaitu :

- a. Sub urusan pengembangan iklim penanaman modal yaitu
  1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,
  2. Pembuatan peta potensi investasi
- b. Sub urusan promosi penanaman modal yaitu penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah,
- c. Sub urusan pelayanan penanaman modal yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,
- d. Sub urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yaitu pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,

- e. Sub urusan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.

Selain mempunyai tugas pokok tersebut DPMPTSP juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi, sebagai berikut :

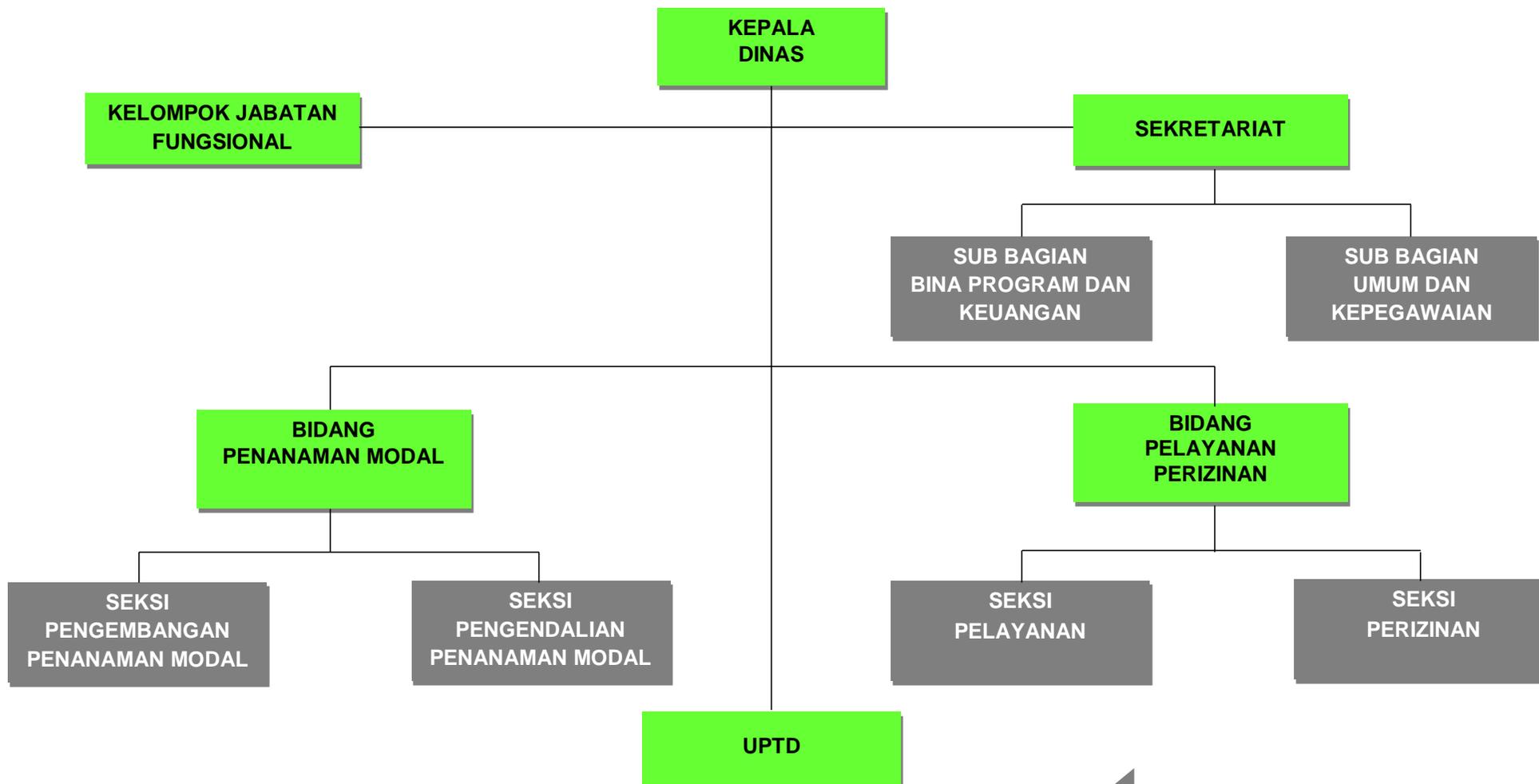
- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang meliputi :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengembangan Penanaman Modal
  - 2) Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- d. Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :
  - 1) Seksi Pelayanan
  - 2) Seksi Perizinan
- e. UPTD
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi DPMPSTSP Kabupaten Pemalang



## 2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia dalam organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran penting untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi. Sumberdaya manusia dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**

#### **Sumberdaya Manusia DPMPSTSP Kabupaten Pemalang**

No	Keterangan	Jumlah
<b>A</b>	<b>ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b>	
1	Pasca Sarjana	7
2	Sarjana	6
3	Diploma	1
4	SMA	12
5	SMP	0
6	SD	0
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>
<b>B</b>	<b>ASN Berdasarkan Golongan</b>	
1	ASN Gol. IV	4
2	ASN Gol. III	12
3	ASN Gol. II	10
4	ASN Gol. I	0
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>
<b>C</b>	<b>ASN Berdasarkan Jenis Kelamin</b>	
1	Laki – Laki	15
2	Perempuan	11
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>
<b>D</b>	<b>Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b>	
1	Pasca Sarjana	1
2	Sarjana	17
3	Diploma	0
4	SMA	16
5	SMP	0
6	SD	0
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>
<b>E</b>	<b>Non ASN Berdasarkan Jenis kelamin</b>	
1	Laki – Laki	21
2	Perempuan	13
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>

Untuk meningkatkan kapasitas Sumberdaya Manusia, berbagai pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah dilakukan oleh ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang. Tercatat sebanyak 26 orang ASN telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sejak selama masa tugasnya.

**Tabel 2.2.**

**Daftar ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT	TEMPAT	PENYELENGGARA	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	KHAERON, SH, MM	KEPALA DINAS	- Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar.	Jakarta	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.	24 Februari 2012
			- Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tingkat Dasar Program 50 JP Sesuai Dengan Standar LKPP.	Pemalang	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.	31 Januari 2012 s/d 06 Februari 2012
			- Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Pemalang	Pusdiklat Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BKD Kabupaten Pemalang dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	06 - 14 Maret 2012
			- Diklatpim	Yogyakarta	Pusdiklat Depdagri Regional Yogyakarta dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.	06 Juli 2009 s/d 05 Agustus 2009
			- Diklatpim	Semarang	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah	
2.	PRASETYO, S.H., M.Si.	KEPALA BIDANG PENANAM AN MODAL	- Diklat Struktural ADUM Departement Dalam Negeri Angkatan 2	Semarang	Kantor Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan	06 Agustus 1996 s/d 3 Oktober 1996
			- Diklat Struktural Lanjutan ADUMLA Departement Dalam Negeri Angkatan 1	Semarang	Badan Diklat Prov Dati I Jawa Tengah	16 November 1998 s/d 26 Desember 1998
			- Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan III Tahun 2019	Semarang	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	12 Februari 2019 s/d 21 Juni 2019

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT	TEMPAT	PENYELENGGARA	TANGGAL PELAKSANAAN
3.	SLAMET UDIARSO, S.Pd,MM	SEKRETA RIS DINAS	- Pelatihan Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan dan Gender	Semarang	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Regional II.	16-20 September 2013
			- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XLI	Semarang	Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.	26 Mei 2015 s/d 08 Oktober 2015.
			- Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kontrak	Pemalang	BKD Kabupaten Pemalang	16-23 Juli 2018
			- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan III.	Semarang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	12 Februari 2019 s/d 21 Juni 2019
4.	ESTHIE WIJAYANTI, S.P,MM	KASI PENGEMB ANGAN PENANAM AN MODAL	- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III	Semarang	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	04-25 Nopember 1999
			- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran	Pemalang	Pemerintah Kabupaten Pemalang	16 April 2002 s/d 01 Mei 2002
			- Training for Trainers (TOT) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perencanaan Program dan Anggaran Daerah	Jakarta	Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia	22-26 Oktober 2002
			- Diklat Fungsional Penjurusan Perencana Tingkat Pertama	Yogyakarta	BAPPENAS RI kerjasama dengan UGM Yogyakarta	12 Juli 2004 s/d 2 Oktober 2004
			- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk.IV)	Semarang	Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.	16 Juni 2009 s/d 31 Juli 2009

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT	TEMPAT	PENYELENGGARA	TANGGAL PELAKSANAAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat Multimedia Pembelajaran Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Renstra SKPD</li> </ul>	<p>Sentul Jawa Barat</p> <p>Pemalang</p>	<p>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri</p> <p>Pemerintah Kabupaten Pemalang</p>	<p>5-9 Oktober 2015</p> <p>24-30 Nopember 2015</p>
5.	SRI MUKTINING RUM, S.IP	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Tingkat II</li> <li>- Pembekalan dan Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>- Inhouse Training Pelatihan Audit Internal</li> <li>- Pendidikan Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ul>	<p>Semarang</p> <p>Pemalang</p> <p>Pemalang</p> <p>Cipanas Jawa Barat</p> <p>Pemalang</p>	<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Pemerintah Kabupaten Pemalang</p> <p>Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang</p> <p>Wisma Pusdiklat BKPM Cipanas</p> <p>Pusdiklat Pengawasan BPKP dan BKD Kabupaten Pemalang</p>	<p>13 Mei 1993 s/d 04 Juni 1993.</p> <p>13-14 Pebruari 2007</p> <p>17 Juni 2009</p> <p>13 Maret 2013 s/d 18 Mei 2013</p> <p>25-29 Maret 2014</p>
6.	MARIS YULI RIANDA, S.IP	KABAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk.IV) Departemen Dalam Negeri Angkatan XIII</li> </ul>	Semarang	Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	13 Oktober 2009 s/d 25 Nopember 2009

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT	TEMPAT	PENYELENGGARA	TANGGAL PELAKSANAAN
7.	AGUS SARWONO, SIP	KEPALA SEKSI PERIJINAN	- BinteK (Bimbingan Teknis) Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah	Pemalang	Pemerintah Kabupaten Pemalang	15-17 Desember 2004
			- Orientasi Pedoman dan Penetapan Sistem Keuangan Pemerintah Daerah	Pemalang	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	18-19 September 2006
			- BinteK Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemalang	Pemerintah Kabupaten Pemalang	29-30 Mei 2006
			- Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama angkatan ke X	Cipanas Jawa Barat	Badan Koordinasi Penanaman Modal	2 Juli 2012
			- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Penegak Perda Badiklat Kementrian Dalam Negeri RI Angk.XXII tahun 2014	Megamendung	Pusdik Reskrim Lemdikpol	22 September 2014 s/d 05 Nopember 2014
			- Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu bagi Pejabat Pelaksana Angkatan I di Lingkungan Pemerintah	Jakarta	Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri	25 Pebruari 2014 s/d 1 Maret 2014
			- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XCI tahun 2017	Semarang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	21 Maret 2017 s/d 21 Juli 2017
- Pelayanan Teknis Pelayanan Publik	Semarang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	12 Maret 2019 s/d 29 Maret 2019			

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT	TEMPAT	PENYELENGGARA	TANGGAL PELAKSANAAN
8.	RANOTO, SH, MM	KEPALA BIDANG PELAYAN AN PERIJINA N	- Pelatihan HAM Bagi Panitia RANHAM Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	Semarang	Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI	21-24 Juni 2010
			- Kegiatan Peningkatan Solidaritas dan Kesetupaduan Masyarakat Kabupaten Pemalang Tahun 2010	Pemalang	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang	28 Juli 2010
			- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Angkatan I Tahun 2011	Pemalang	Pola Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	20 Juni 2011 s/d 06 Juli 2011
			- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan LV Tahun 2016	Semarang	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah	16 Februari 2016 s/d 17 Juni 2016
			- Workshop Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bogor	Synergy Icon Solutions	13-15 April 2018
			- Workshop Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Bogor	Synergy Icon Solutions	15-17 Maret 2019
			- Pameran dan Seminar Pengadaan Barang dan Jasa	Yogyakarta	IPFE IAPI 2019	19-21 Maret 2019
9.	RATIKNO, SH, MM	PENGELO LA DATA PERIJINA N	- Pelatihan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD)	Semarang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	9 Mei 2005 s/d 11 Mei 2005

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT	TEMPAT	PENYELENGGARA	TANGGAL PELAKSANAAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Bimtek Pengelola Perpustakaan Sekolah Tingkat Kabupaten Pemalang Tahun 2006</li> <li>- Pelatihan Fasilitator Desa Intensif (FDI) Dinas Pendidikan Kab/Kota se Jawa Tengah</li> <li>- Bimtek Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) Kab/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Peningkatan Mutu PTK-PNF Kabupaten Pemalang</li> <li>- Pelatihan Teknis Manajemen Pengembangan Investasi Daerah</li> <li>- Pelatihan Teknis Pelayanan Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemalang</li> <li>Semarang</li> <li>Semarang</li> <li>Pemalang</li> <li>Semarang</li> <li>Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang</li> <li>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang</li> <li>BPSDMD Provinsi Jawa Tengah</li> <li>BPSDMD Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7-9 November 2006</li> <li>18-20 Mei 2006</li> <li>22-24 Mei 2007</li> <li>10-12 Agustus 2009</li> <li>8-25 Oktober 2019</li> <li>3-13 Maret 2020</li> </ul>
10.	WIDYO UTOMO, S.Kom	ANALIS HUMAS DAN PROTOKOL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat Prajabatan Golongan I dan II</li> <li>- Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran</li> <li>- Diklat Manajemen Aparatur Sipil Negara</li> <li>- Diklat E-Voting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kutai Timur</li> <li>Pemalang</li> <li>Pemalang</li> <li>Pemalang (Hotel Regina)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>BKN</li> <li>Pemerintah Kabupaten Pemalang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19 Nopember 2012 s.d 11 Desember 2012</li> <li>15-28 Nopember 2016</li> <li>30 Oktober 2017 s/d 07 Nopember 2017</li> <li>24-26 April 2018</li> </ul>

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT	TEMPAT	PENYELENGGARA	TANGGAL PELAKSANAAN
11.	NUROKHMAH	PENGELOLA DOKUMEN PERIJINAN	- Diklat Prajabatan Tingkat II	Semarang	Team Penyelenggara Latihan Pra Jabatan Kabupaten Dati II Pemalang	06-26 Maret 1990
			- Diklat Teknis Bendaharawan Daerah	Pemalang	Pemerintah Kabupaten Pemalang	29 Mei 2002 s/d 28 Juni 2002
			- Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	Pemalang	Pemerintah Kabupaten Pemalang	26-28 Juni 2007
12.	SLAMET DODING SB	PETUGAS KEAMANAAN	- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Teknis Pengembangan Usaha Pariwisata	Semarang	Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah di Sasana Widya Praja	02-28 Maret 2005
13.	ELI WAHYU ARIANI, ST	KASUBAG BINA PROGRAM&KEUANGAN	- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II	Pemalang	Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah.	06-16 Juni 2011
			- Pelatihan analisis dan Penulisan Profil Potensi Investasi Daerah di Jawa Tengah	Karangany ar Solo	Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah	12-14 Juni 2013
			- Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Teradu Satu Pintu PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama	Cipanas Jawa Barat	Badan Koordinasi Penanaman Modal	13-18 Mei 2013
			- Pelatihan Teknis Pengelolaan Perijinan Bangunan	Semarang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	09-26 Oktober 2018
14.	ANI ANDRIYANI, A.Md	PRANATA KOMPUTER MAHIR	- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Pemalang	Bkd Kabupaten Pemalang	23 Mei 2011 s/d 23 Juni 2011
			- SPIPISE	Cipanas Jawa Barat	Wisma Diklat BKPM	09 Agustus 2011 s/d 12 Agustus 2011
			- SIPJAKI	Hotel LE Grandeur Jakarta	Kementrian Pekerjaan Umum	15 Mei 2012

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT	TEMPAT	PENYELENGGARA	TANGGAL PELAKSANAAN
			- PTSP Tk PERTAMA	Cipanas Jawa Barat	Wisma Diklat BKPM	18 Juni 2012 s/d 23 Juni 2012
			- PTSP lanjutan II	Cipanas Jawa Barat	Wisma Diklat BKPM	01 Oktober 2012 s/d 5 Oktober 2012
			- ANALISIS JABATAN	Pemalang	BKD Pemalang	05-15 Pebruari 2013
			- ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Pemalang	BKD Pemalang	16-23 Mei 2013
			- Profil Investsai	River Hills Tawangmangu Karanganyar	DPMPTSP Prov, Jateng	12-14 Juni 2013
			- Evaluasi Jabatan	Pemalang	BKD Pemalang	10-15 Nopember 2014
			- EVOTING	Pemalang	BKD Pemalang	24-26 April 2018
			- Keterbukaan Informasi Publik	Hotel Winner Pemalang	Diskominfo Pemalang	25 Mei 2021
			- LAPOR	Pemalang	Diskominfo Pemalang	08 Juli 2020
15.	FELIA KARLINDA, S.Sos	ANALIS PELAYANAN	Tidak ada			
16.	PUJI NURYATI, S.Sos	ANALIS PELAYANAN	Tidak ada			
17.	HINDERO BUDIJONO	PENGADM INISTRASI UMUM	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II	Semarang	Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	31 Oktober 2008 s/d 18 Nopember 2008
18.	BAMBANG SUKIRMAN	PENGELO LA KEUANGAN	- Diklat Prajabatan Golongan I dan II	Pemalang	Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	03 Maret 2009 s/d 25 Maret 2009

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT	TEMPAT	PENYELENGGARA	TANGGAL PELAKSANAAN
			- Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelanjutan Untuk Desentralisasi	Pemalang	PT. Kogas Driyap Konsultan berasosiasi dengan PT. IDI Kajang Consultant dan LPM Unsoed	25-27 Mei 2009
			- Diklat Manajemen Barang Milik Daerah	Pemalang	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP	04 Pebruari 2014 s/d 8 Pebruari 2014
19.	RENI SRI DIARTINI		- Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama angkatan ke XIII	Cipanas Jawa Barat	Badan Koordinasi Penanaman Modal	18-23 Agustus 2014
			- Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II	Pemalang	Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	23 Juli 2009 s/d 13 Agustus 2009
20.	MUSOLEH	PENGELOLA KEUANGAN	- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Perijinan Bangunan	Semarang	Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	09 November 2015 s/d 27 November 2015
21.	CAYONO	PENGEMUDI	- Diklat Prajabatan Golongan I dan II	Pemalang	Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	18 Agustus 2010 s/d 06 September 2010
			- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peningkatan kapasitas driver	Pemalang	Pemerintah Kabupaten Pemalang	07 Mei 2012
22.	BINTI NASIROH	PENGOLAH DATA PELAYANAN	- Diklat Prajabatan Golongan I dan II	Pemalang	Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	22 Maret 2010 s/d 10 April 2010
23.	SUWINARNI	PENGOLAH DATA PELAYANAN	- Diklat Prajabatan Golongan I dan II	Pemalang	Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	18 Agustus 2010 s/d 6 September 2010

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT	TEMPAT	PENYELENGGARA	TANGGAL PELAKSANAAN
24.	AGUS SUSILO	PENGELOLA DOKUMEN PERIJINAN	Tidak ada			
25.	RUSMIYATI	PENGELOLA KEUANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat Prajabatan Golongan I dan II</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama angkatan ke II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemalang</li> <li>Cipanas Jawa Barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Badan Koordinasi Penanaman Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 Agustus 2010 s/d 6 September 2010</li> <li>03-08 Maret 2014</li> </ul>
26.	ACHMAD MUZAKI	PENGELOLA PENGEMBANGAN INVESTASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat Prajabatan Golongan I dan II</li> <li>- Polisi Pamong Praja Corps Building Tahun 2013</li> <li>- Diklat Dasar atuan Polisi Pamong Praja Pola 150 JP</li> <li>- Bimbingan Teknis TURJAWALI</li> <li>- (Pengaturan, Penja gan, Pengawasan dan Patroli) Satuan Polisi Pamong</li> <li>- Diklat Teknis Keprotokolan</li> <li>- Bimbingan Taknis Negoisiasi, Mediasi dan Komunikasi Massa/Dalmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemalang</li> <li>Wonogiri</li> <li>Bogor</li> <li>Semarang</li> <li>Pemalang</li> <li>Semarang</li> <li>Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Kementerian Dalam Negeri Ditjen Pemerintahan Umum</li> <li>Kementerian Dalam Negeri</li> <li>Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Tengah</li> <li>BPSDM Provinsi Jawa Tengah</li> <li>BPSDM Provinsi Jawa Tenga</li> <li>Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>22 Maret 2011 s/d 11 April 2011</li> <li>10 – 13 September 2013</li> <li>25 Agustus 2014 s/d 10 September 2014</li> <li>5-6 November 2015</li> <li>10 – 12 Agustus 2009</li> <li>20 – 27 Maret 2017</li> <li>20 – 21 Juli 2017</li> </ul>

## **2.2.2. Sarana Prasarana**

Sarana prasarana memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi yaitu mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu proses dan meningkatkan produktivitas. Sarana dan prasarana dalam DPMPSTSP Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

### **2.2.2.1. Ruang Pelayanan**

Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, DPMPSTSP Kabupaten Pemalang memiliki ruang pelayanan yang terdiri dari :

- 1) Ruang Tunggu
- 2) Ruang Informasi
- 3) Ruang Pendaftaran
- 4) Ruang Pengambilan Perizinan
- 5) Ruang Pamer
- 6) Ruang Penerima Tamu/Pengaduan
- 7) Ruang Gerai Investasi
- 8) Ruang Tim Teknis
- 9) Perpustakaan
- 10) Ruang Laktasi
- 11) Taman Bermain

### **2.2.2.2. Barang Inventaris**

Sedangkan hasil inventarisasi sarana dan prasarana sebagai alat pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan di DPMPSTSP Kabupaten Pemalang sudah cukup memadai namun diperlukan pemeliharaan dalam rangka mempertahankan sarana dan prasarana kerja tersebut supaya dapat bekerja secara optimal apabila diperlukan dapat menambah sarana dan prasarana yang baru agar pekerjaan lebih optimal. Barang inventaris DPMPSTSP Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Barang Inventaris**

No.	Nama / Jenis Barang	Satuan	Jumlah	No.	Nama / Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Unit	1	50	Tiang Bendera	Unit	1
2	Portable Generating Set	Unit	1	51	Tangga Alumunium	Set	1
3	Station Wagon	Unit	8	52	Dispenser	Unit	5
4	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Unit	1	53	Alat Rumah Tangga lain-lain	Unit	23
5	Sepeda Motor	Unit	15	54	Alat Pemadam Portable	Unit	4
6	Sepeda	Unit	1	55	P.C Unit	Unit	30
7	Sound Detector	Unit	1	56	Laptop	Unit	24
8	Global Positioning System	Unit	1	57	Personal Komputer Lain-lain	Unit	1
9	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Unit	3	58	Card Reader	Unit	1
10	Mesin Fotocopy dengan kertas folio	Unit	1	59	Printer	Unit	25
11	Lemari Besi	Unit	7	60	Monitor	Unit	3
12	Rak Besi/Metal	Set	12	61	Scanner	Unit	4
13	Rak Kayu	Set	12	62	Peralatan personal komputer lain-lain	Unit	5
14	Filling besi/Metal	Set	6	63	Server	Set	2
15	Filling Kayu	Set	8	64	Hub	Set	1
16	Lemari Kaca	Unit	1	65	Peralatan jaringan lain-lain	Set	1
17	Lemari Kayu	Unit	6	66	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1
18	Papan Visuil	Unit	5	67	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	9
19	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	68	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	4
20	Papan Nama Instansi	Unit	1	69	Meja kerja pegawai non struktural	Unit	69
21	Papan pengumuman	Unit	1	70	Kursi kerja pejabat eselon II	Unit	1
22	White Board	Unit	4	71	Kursi kerja pejabat eselon III	Unit	9

No.	Nama / Jenis Barang	Satuan	Jumlah	No.	Nama / Jenis Barang	Satuan	Jumlah
23	Mesin Absensi	Unit	1	72	Kursi kerja pejabat eselon IV	Unit	4
24	Alat kantor lainnya (Lain-lain)	Unit	10	73	Kursi kerja pegawai non struktural	Unit	53
25	Lemari Kayu	Unit	6	74	Camera+attachment	Unit	1
26	Rak Kayu	Set	9	75	Proyektor+attachment	Unit	1
27	Kursi Besi/Metal	Set	2	76	Equalizer	Unit	2
28	Meja Rapat	Unit	24	77	Microphone/wireless mic	Set	1
29	Meja Reseption	Unit	12	78	Peralatan studio visual lain-lain	Set	2
30	Meja Bundar	Unit	1	79	Camera electronic	Unit	3
31	Kursi Rapat	Unit	113	80	Telephone (PABX)	Unit	1
32	Kursi Tamu	1 Set	1	81	Pesawat Telephone	Unit	1
33	Bangku Tunggu	Set	11	82	Facsimile	Unit	1
34	Meja Komputer	Unit	7	83	Handphone	Unit	7
35	Sofa	Set	3	84	Wireless Amplifier	Unit	1
36	Jam Mekanis	Unit	2	85	Bangunan gedung kantor permanen	m2	1
37	Mesin penghisap debu	Unit	1	86	Bangunan tempat kerja lain-lain	m2	1
38	Mesin potong rumput	Unit	1	87	Jaringan transmisi tegangan di atas 300 KVA	m2	1
39	Lemari Es	Unit	2	88	Ilmu Pengetahuan Umum	Buah	141
40	AC Unit	Unit	6	89	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	Buah	1
41	AC Split	Unit	20	90	Buku umum lain-lain	Buah	4
42	Exhause Fan	Unit	1	91	Buku TIK	Buah	50
43	Kompore Gas	Set	1	92	Ilmu politik	Buah	50
44	Tabung Gas	Unit	1	93	Ekonomi	Buah	50
45	Televisi	Unit	4	94	Hukum	Buah	28
46	Amplifier	Set	1	95	Perdagangan	Buah	45

No.	Nama / Jenis Barang	Satuan	Jumlah	No.	Nama / Jenis Barang	Satuan	Jumlah
47	Loudspeaker	Set	10	96	Management dan perkantoran	Buah	1
48	Sound System	Set	1	97	Buku arsitektur, kesenian, olahraga lain-lain	Buah	30
49	Aquarium	Unit	1	98	Barang kerajinan lain-lain	Set	17

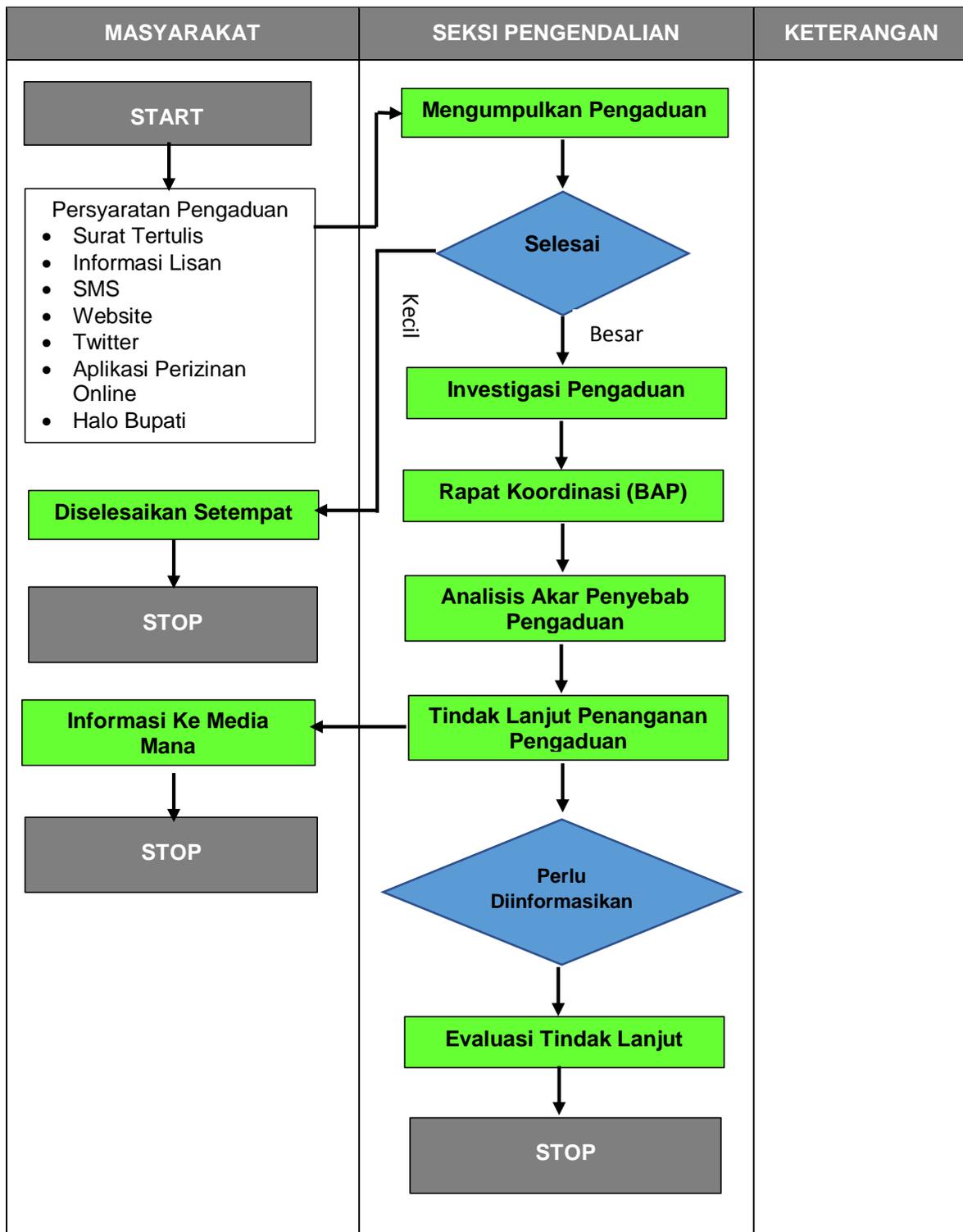
### 2.2.2.3. Sarana Prasarana Pengaduan Saran dan Masukan

Untuk terus meningkatkan perbaikan kinerja layanan, sejak tahun 2013 juga telah dikembangkan sarana dan prasarana pengaduan saran dan masukan melalui program SMS Center. Program SMS merupakan program pengembangan sarana pengaduan masyarakat terhadap kinerja layanan DPMPTSP. Nomor telepon yang dapat dihubungi adalah 081 2277 22224 dengan cara mengetik :

- 1) Untuk aduan : Ketik ADUAN Spasi Uraian Aduan
- 2) Untuk cek status permohonan : Ketik STATUS Spasi Nomor Pendaftaran
- 3) Untuk saran : Ketik SARAN Spasi Uraian Saran

Selain dengan SMS Center, masyarakat juga dapat melakukan pengaduan baik tertulis, lisan, website maupun twitter. Mekanisme tindak lanjut dari pengaduan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.2.**  
**Mekanisme Pengaduan Masyarakat**



#### **2.2.2.4. Sarana Prasarana Gerai Investasi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang pada tanggal 20 Mei 2019 telah melaunching Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang di ruang pelayanan kantor DPMPTSP. Terobosan ini diperuntukkan guna meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas pelayanan di bidang investasi. Launching Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang ini, dimaksudkan agar para investor mendapatkan layanan konsultasi penanaman modal dan informasi yang cukup sebelum berinvestasi di Kabupaten Pemalang.

Gerai Investasi Potensi Kabupaten Pemalang ini memanfaatkan dukungan teknologi informasi berupa media web yang dapat diakses melalui [website website.investasi.pemalangkab.go.id](http://website.investasi.pemalangkab.go.id) yang sangat berguna bagi investor untuk bisa melihat peluang investasi sektor hortikultura, industri, perikanan, pertanian, peternakan dan pariwisata. Dalam media ini, investor juga dapat melihat informasi tata ruang dan lahan dari wilayah yang diinginkan.

#### **2.2.3. Kinerja Pelayanan**

##### **2.2.3.1. Janji, Kebijakan Mutu dan Motto**

Guna untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsinya tersebut, DPMPTSP Kabupaten Pemalang menetapkan Janji, Kebijakan Mutu dan Motto nya sebagai berikut :

- a. Janji :
  - 1) Memberikan pelayanan dengan prinsip 3 S (Senyum, Sapa dan simpatik );
  - 2) Melayani dengan Transparan dan Akuntabel ;
  - 3) Mewujudkan pelayanan *Zero Complain* ;
  - 4) Pelayanan Prima dengan 3 Buka ( Buka Mata, Buka Telinga dan Buka Mata Hati )
- b. Kebijakan Mutu DPMPTSP Kabupaten Pemalang adalah ” *Seluruh Aparat DPMPTSP Kabupaten Pemalang Bekerja Demi Kepuasan Pelanggan dengan Menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Terus Menerus Memperbaiki Keefektifannya Demi Kesejahteraan Bersama* ”
- c. Motto : ”**MELAYANI DENGAN MUTU**”

Dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu dan adanya konsistensi terhadap pelayanan perizinan di Lingkungan Organisasi DPMPTSP maka DPMPTSP Kabupaten Pemalang juga telah mendapatkan Sertifikat Quality Management System ISO 9001 : 2015 dengan Sertifikat No :SZT.2019.SB.2.0.231 tertanggal 25 Desember 2019 melalui konsultan CV. Mitra Sejati Fazahara, Sleman Yogyakarta.

### **2.2.3.2. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu**

Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu merupakan program Komputerisasi Sistem Pelayanan Perizinan yang merupakan alat bantu dalam pemrosesan perizinan yang meliputi proses pendaftaran, pendataan, entri data, verifikasi, penetapan, dan cetak secara terintegrasi.

Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu yang diluncurkan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang sejak tanggal 5 Desember tahun 2015 dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari masyarakat yang kesulitan ketika ingin mengetahui berkas Perizinannya apakah sudah selesai atau belum. Melalui Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu setidaknya masyarakat dapat mengakses sistem untuk memastikan bahwa permohonannya diproses bahkan dapat mengetahui setiap tahapan yang telah dilalui dalam proses pelayanan Perizinannya.

Program ini memudahkan masyarakat dengan cukup membuat akun, mengirimkan persyaratan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan dan memantau status permohonannya. Ketika status proses permohonan cek lokasi, maka pemohon cukup datang untuk menyerahkan dokumen asli yang dipersyaratkan.

Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu dapat diakses melalui <http://izinonline.pemalangkab.go.id>. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu terbagi dalam 6 menu yaitu :

- 1) Menu Pelayanan Perizinan
- 2) Menu SMS Center
- 3) Menu e-Doc
- 4) Menu Perizinan Online
- 5) Menu GIS Perizinan
- 6) Menu Informasi

- 7) Menu IKM
- 8) Menu OSS

### 2.2.3.3. Capaian Kinerja Pelayanan

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari realisasi investasi pertahun yang terjadi selama tahun 2016 sampai dengan 2020 dimana realisasi investasi telah melampaui target investasi yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 5 milyar per tahun.

**Tabel 2.4**  
**Target dan Realisasi Investasi**

NO	TAHUN	TARGET INVESTASI (Rp)	REALISASI INVESTASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2016	5.000.000.000	255.359.969.835	5.107,20
2	2017	5.000.000.000	28.890.500.000	577,81
3	2018	5.000.000.000	93.634.691.900	1.872,69
4	2019	5.000.000.000	1.753.353.206.637	35.067,00
5	2020	5.000.000.000	166.492.408.001	3.329,85

Pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang juga dapat dilihat dari banyaknya jenis perizinan dan jumlah perizinan yang telah diterbitkan dalam 5 tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Jenis Perizinan dan Banyaknya Perizinan Yang Telah Diterbitkan**

No.	Jenis Perizinan	Terbit				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>A.</b>	<b>Perizinan Terstruktur :</b>					
1	Ijin Prinsip / Rekomendasi	121	116	135	102	90
2	Ijin Lokasi	5	8	5	42	15
3	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	244	241	230	266	172
4	Ijin Gangguan (HO)	1037	511	-	-	-
5	Izin Usaha Industri (IUI)	0	11	0	52	-
6	Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	-	-	148	-	-
7	Komitmen Persetujuan Izin Usaha Industri (IUI)	-	-	-	-	5
8	Tanda Daftar Industri (TDI)	115	125	-	-	-

No.	Jenis Perizinan	Terbit				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Ijin Usaha Atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras	64	38	65	15	18
10	Tanda Daftar Gudang (TDG)	18	27	9	12	15
11	Ijin Usaha Perikanan :	-	-	-	-	-
	- SIUP ( Surat Izin Usaha Perikanan )	72	6	0	6	4
	- SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan )	102	5	-	-	-
11	Ijin Instalasi Listrik	0	0	0	0	-
12	Ijin Pesawat Angkat dan Angkut	0	0	0	0	-
13	Ijin Pesawat Tenaga Dan Produksi/Disel	0	0	0	0	-
14	Ijin Penyalur Petir	1	0	0	0	-
15	Ijin Pesawat Lift	1	0	0	0	-
16	Ijin Instalasi Kebakaran	2	0	0	0	-
17	Rekomendasi Ijin Pendirian Kantor Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/P4	1	5	1	1	0
	Rekomendasi Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia	-	-	-	0	0
18	Rekomendasi Pendirian Penitipan Anak Dan Kelompok Bermain	0	0	0	0	0
19	Surat Ijin Operasional Panti	0	6	6	1	2
20	Ijin Usaha Angkutan	16	5	2	7	2
21	Ijin Usaha Jasa Konstruksi	106	71	41	65	39
22	Rekomendasi Ijin Unit Transfusi Darah	0	1	0	0	0
23	Ijin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional	2	1	3	-	-
	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional	-	-	-	10	6
24	Ijin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control)	0	0	0	0	0
25	Ijin Penyelenggaraan Optikal	3	1	3	3	1
26	Rekomendasi Ijin Produksi Air Minum Dalam Kemasan	0	0	0	0	0
27	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	1	4	2	7	2
28	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Hotel	1	0	0	0	0
29	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum	0	0	0	0	0
	- Sertifikasi Laik Sehat Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	-	-	45	70	61
30	Sertifikasi Laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran	0	1	1	0	1

No.	Jenis Perizinan	Terbit				
		2016	2017	2018	2019	2020
31	Ijin Usaha Pariwisata pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pemalang	0	0	0	0	0
32	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	-	100	220	131	217
33	Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja	-	1	-	-	-
34	Pendaftaran Penanaman Modal	-	-	6	-	-
35	Izin Usaha Penanaman Modal	-	-	5	-	-
36	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	-	-	36	90	81
37	Izin Pendidikan Dasar	-	-	0	0	0
	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal	-	-	-	-	0
38	Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	-	-	-	10	5
	Izin lembaga kursus dan pelatihan	-	-	3	5	4
	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	-	-	-	8	0
39	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	0	3	-
40	Izin mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, Kelas D Pratama	-	-	-	-	0
	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, Kelas D Pratama	-	-	-	-	1
41	Izin Operasional Tetap Klinik	-	-	1	11	10
	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama	-	-	-	-	3
42	Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-
	-Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	-	-	40	61	62
	-Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	-	-	8	6	5
	-Surat Izin Prakter Dokter (SIP)	-	-	102	151	128
	-Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	-	-	343	181	-
	-Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	-	-	21	134	362
	-Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	-	-	50	77	45
	-Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	-	-	52	54	16
	-Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	-	-	6	1	5
	-Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	-	-	3	10	2
	-Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	-	-	5	39	25
	-Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	-	-	4	4	1

No.	Jenis Perizinan	Terbit				
		2016	2017	2018	2019	2020
	-Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	-	-	16	0	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan	-	-	27	4	40
	-Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	-	-	219	179	246
	-Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	-	-	8	42	29
	-Surat izin Kerja Perekam Medis	-	-	9	11	9
	-Surat izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	-	-	1	5	1
	Surat Izin Tukang Gigi	-	-	-	2	0
	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	-	-	-	1	0
	Surat Izin Kerja Terapis Wicara	-	-	-	1	0
	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)	-	-	-	-	2
42	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	-	-	0	0	0
43	Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Kelas I dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I	-	-	0	0	2
44	Izin Apotek, Toko Obat dan Toko Alat Kesehatan	-	-	-	-	-
	- Izin Apotek (SIA)	-	-	23	47	27
	- Izin Toko Obat	-	-	3	3	12
	- Izin Toko Alat Kesehatan	-	-	0	0	1
45	Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga (PIRT)	-	-	126	184	193
46	Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	0	1	0
47	Izin Pemakaian Alun-alun	-	-	2	0	0
48	Izin Pemakaian Taman Patih Sampun	-	-	0	0	0
49	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	0	0	0
50	Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)	-	-	0	0	0
51	Izin Pembangunan dan Pengembangan Permukiman	-	-	0	0	0
52	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten	-	-	0	0	0
53	Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	5	10	20
54	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	-	-	0	0	0
55	Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	-	-	-	-	-

No.	Jenis Perizinan	Terbit				
		2016	2017	2018	2019	2020
	1. Izin Pembuangan Limbah Cair	-	-	6	4	3
	2. Izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	-	-	7	13	12
	3. Izin Pengumpulan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) skala Kabupaten	-	-	0	0	0
56	Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	-	-	0	0	0
57	Izin Pengesahan dan registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	-	-	77	84	63
58	Persetujuan permohonan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah industri di rumah sakit, hotel dan pabrik	-	-	0	0	0
59	Izin Lingkungan	-	-	37	20	14
60	Izin Membuka Tanah	-	-	0	0	0
61	Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	-	-	0	0	0
62	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	-	-	63	43	22
63	Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten	-	-	0	0	0
64	Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten	-	-	0	0	0
65	Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten	-	-	0	0	0
66	Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	-	-	0	0	0
67	Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan	-	-	0	0	0
68	Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	-	-	0	0	0
69	Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	-	-	0	0	0

No.	Jenis Perizinan	Terbit				
		2016	2017	2018	2019	2020
70	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	-	-	0	0	0
71	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	-	-	0	0	0
72	Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal	-	-	0	0	0
73	Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal	-	-	0	0	0
74	Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal	-	-	0	0	0
75	Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	0	0	0
76	Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal	-	-	0	0	0
77	Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal	-	-	0	0	0
78	Izin Mendirikan Bangunan tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	-	-	0	0	0
79	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	-	-	0	0	0
80	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	-	-	0	0	0
81	Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten	-	-	0	0	0
82	Izin Insidentil	-	-	0	0	0
83	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	-	-	14	11	14
84	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	-	-	29	0	2
85	Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	-	-	0	0	0
86	Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro	-	-	2907	3187	3924
87	Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	-	-	0	0	0
88	Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten	-	-	0	0	0
89	Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	-	-	-	0	0

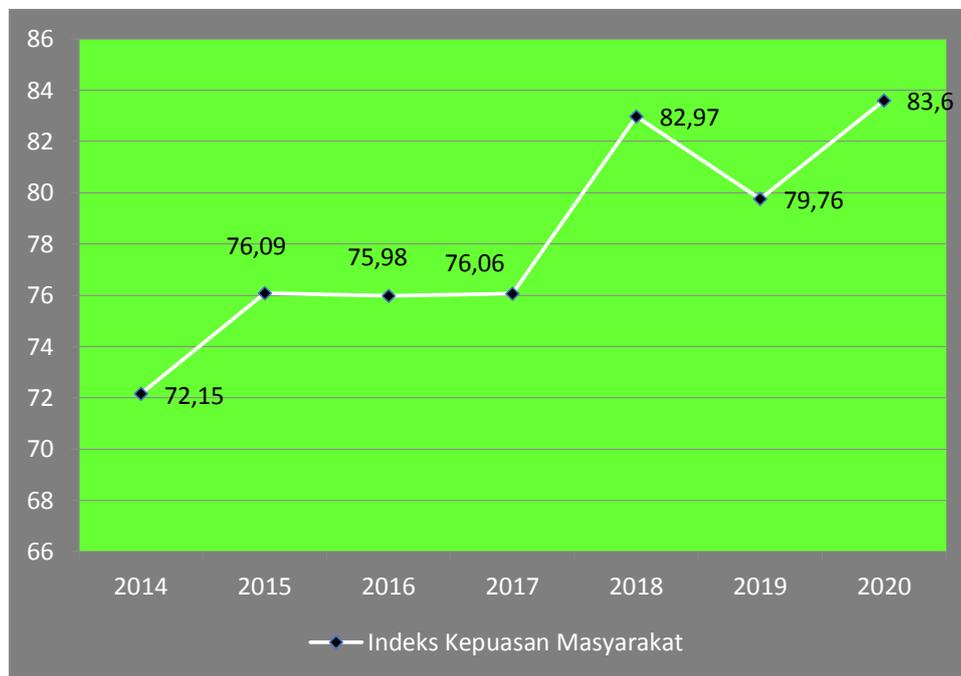
No.	Jenis Perizinan	Terbit				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Izin Usaha Peternakan	-	-	1	7	3
	Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat	-	-	7	16	9
	Izin Praktik Dokter Hewan	-	-	-	2	0
	Izin Klinik Hewan	-	-	-	1	0
90	Izin Usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan	-	-	0	1	0
91	Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	-	-	0	0	0
92	Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat	-	-	0	0	0
93	Izin Usaha Toko Modern	-	-	80	2	0
94	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah	-	-	0	0	0
95	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	-	-	0	0	0
<b>B</b>	<b>Perizinan Tidak Terstruktur :</b>	-	-	-	-	-
1	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	956	861	713	-	6
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1005	980	777	-	-
3	Ijin Usaha Pariwisata	51	43	-	-	-
4	Ijin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW)	3	1	1	0	1
5	Ijin Penyelenggaraan Reklame	732	508	821	413	308
6	Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Reklame	18	17	13	15	6
7	Ijin Pemakaian Lapangan Sirandu	10	9	14	4	0
8	Ijin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo	3	5	5	4	0
9	Ijin Pemakaman	30	26	16	27	30
10	Ijin Pengabuan Mayat	12	5	10	17	12
<b>Jumlah</b>		<b>4.732</b>	<b>3.739</b>	<b>7.639</b>	<b>5.996</b>	<b>6.416</b>

Capaian kinerja lainnya adalah tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Dalam periode 7 tahun terakhir, perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

mengalami trend yang cenderung meningkat dari 72,15 di tahun 2014 menjadi 83,60 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan di Kabupaten Pemalang semakin baik.

**Gambar 2.3.**

**Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat**



Sementara itu capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja utama menunjukkan bahwa seluruh indikator yaitu indikator nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), indikator persentase pengaduan pelayanan perizinan dan investasi yang ditindak lanjuti/ditangani dan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan telah dapat direalisasikan dengan sangat baik atau dengan kata lain telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Pemalang selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTP**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (dalam jutaan)				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	255.359	28.890	93.634	1.753.353	166.492	5.107,19	577,81	1.872,69	349,71	406,21
2	Prosentase Pengaduan Pelayanan Perijinan dan Investasi yang ditindaklanjuti/ ditangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perijinan dan Non Perijinan				76	76	76	77	77,2	75,98	76,06	82,97	79,76	83,6	99,97 %	100,08 %	109,17 %	104,95 %	110,00 %

Untuk kinerja anggaran menunjukkan bahwa di tahun 2020 realisasi anggaran yang mampu dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Pemalang adalah sebesar 98,46% di bandingkan dengan targetnya. Berbeda halnya dengan tahun 2019 dimana pencapaian kinerjanya hanya sebesar 74,62%. Capaian kinerja anggaran DPMPTSP Kabupaten Pemalang selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Capaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan**

Program dan Kegiatan	TAHU 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	759.174.500,00	731.144.598,00	96,31	866.002.000,00	835.443.815,00	96,47	1.305.861.000,00	1.007.605.064,00	77,16	874.230.656,00	869.593.601,00	99,47
Penyediaan jasa surat menyurat	N/A	N/A	N/A	68.075.000,00	63.509.000,00	93,29	85.297.500,00	82.147.500,00	96,31	107.002.500,00	103.461.500,00	96,69	112.915.000,00	111.892.000,00	99,09
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	N/A	N/A	N/A	114.600.000,00	100.870.489,00	88,02	114.600.000,00	101.228.783,00	88,33	220.200.000,00	102.066.349,00	46,35	104.725.056,00	102.880.345,00	98,24
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	N/A	N/A	N/A	15.100.000,00	12.653.775,00	83,80	18.400.000,00	15.850.875,00	86,15	33.300.000,00	20.085.375,00	60,32	35.300.000,00	33.932.500,00	96,13
Penyediaan jasa kebersihan kantor	N/A	N/A	N/A	43.250.000,00	43.210.700,00	99,91	48.800.000,00	48.792.615,00	99,98	117.100.000,00	57.087.750,00	48,75	73.324.000,00	73.319.000,00	99,99
Penyediaan alat tulis kantor	N/A	N/A	N/A	47.510.000,00	47.325.000,00	99,61	48.140.000,00	47.960.000,00	99,63	50.900.000,00	50.880.000,00	99,96	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	N/A	N/A	N/A	35.050.000,00	33.950.000,00	96,86	37.474.000,00	37.355.400,00	99,68	39.021.000,00	39.019.000,00	99,99	40.016.600,00	39.991.000,00	99,94
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	N/A	N/A	N/A	12.963.500,00	11.449.000,00	88,32	11.668.000,00	11.478.500,00	98,38	74.040.000,00	11.767.750,00	15,89	11.800.000,00	11.747.500,00	99,56

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Program dan Kegiatan	TAHU 2016			TAHU 2017			TAHU 2018			TAHU 2019			TAHU 2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	N/A	N/A	6.100.000,00	5.725.000,00	93,85	-	-	-	-	-	-	11.600.000,00	11.591.000,00	99,92
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	18.891.000,00	17.542.000,00	92,86	15.160.000,00	13.606.000,00	89,75	11.600.000,00	11.551.500,00	99,58	11.600.000,00	11.591.000,00	99,92
Penyediaan makanan dan minuman	N/A	N/A	N/A	43.500.000,00	42.872.000,00	98,56	62.940.000,00	62.523.000,00	99,34	74.830.000,00	74.770.000,00	99,92	101.850.000,00	101.802.500,00	99,95
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	N/A	N/A	N/A	201.050.000,00	199.189.084,00	99,07	269.072.500,00	260.319.036,00	96,75	386.267.500,00	386.243.432,00	99,99	148.890.000,00	148.750.756,00	99,91
Penyediaan jasa keamanan	N/A	N/A	N/A	101.950.000,00	101.940.000,00	99,99	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	151.800.000,00	110.992.500,00	73,12	127.000.000,00	127.000.000,00	100,00
Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	N/A	N/A	N/A	51.135.000,00	50.908.550,00	99,56	51.250.000,00	50.982.106,00	99,48	39.800.000,00	39.679.908,00	99,70	45.210.000,00	45.196.000,00	99,97
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	N/A	N/A	N/A	<b>608.745.000,00</b>	<b>593.165.735,00</b>	<b>97,44</b>	<b>468.483.700,00</b>	<b>460.776.195,00</b>	<b>98,35</b>	<b>1.966.223.000,00</b>	<b>930.262.612,00</b>	<b>47,31</b>	<b>376.934.500,00</b>	<b>374.831.102,00</b>	<b>99,44</b>
Pengadaan kendaraan dinas operasional	N/A	N/A	N/A	71.105.000,00	61.145.000,00	85,99	-	-	-	-	-	-	6.400.000,00	5.992.000,00	93,63

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Program dan Kegiatan	TAHU 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	N/A	N/A	N/A	-	-	-	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50	501.050.000,00	980.000,00	0,20	6.400.000,00	5.992.000,00	93,63
Pengadaan peralatan gedung kantor	N/A	N/A	N/A	-	-	-	31.000.000,00	30.957.599,00	99,86	536.030.500,00	173.319.273,00	32,33	41.050.000,00	40.500.000,00	98,66
Pengadaan mebeleur	N/A	N/A	N/A	-	-	-	39.990.000,00	38.303.400,00	95,78	239.029.500,00	238.847.026,00	99,92	-	-	-
Pengadaan komputer dan perlengkapannya	N/A	N/A	N/A	16.900.000,00	16.762.500,00	-	33.800.000,00	31.721.750,00	93,85	258.800.000,00	237.345.146,00	91,71	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	N/A	N/A	N/A	314.505.000,00	312.836.700,00	99,47	45.113.500,00	45.112.500,00	100,00	41.580.000,00	41.572.500,00	99,98	70.029.500,00	70.023.000,00	99,99
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	N/A	N/A	N/A	82.275.000,00	81.547.095,00	99,12	71.644.200,00	71.595.793,00	99,93	148.750.000,00	147.631.667,00	99,25	141.570.000,00	141.432.406,00	99,90
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	N/A	N/A	N/A	24.600.000,00	24.400.000,00	99,19	29.125.000,00	28.400.000,00	97,51	29.475.000,00	29.465.000,00	99,97	27.440.000,00	27.440.000,00	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	N/A	N/A	N/A	22.660.000,00	20.984.000,00	92,60	19.506.000,00	17.725.750,00	90,87	160.498.000,00	10.583.000,00	6,59	5.805.000,00	5.805.000,00	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	N/A	N/A	N/A	2.000.000,00	1.995.000,00	99,75	2.890.000,00	2.820.000,00	97,58	2.990.000,00	2.986.000,00	99,87	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	N/A	N/A	N/A	17.500.000,00	17.452.000,00	99,73	11.750.000,00	11.747.000,00	99,97	11.750.000,00	11.739.000,00	99,91	11.750.000,00	11.741.000,00	99,92

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Program dan Kegiatan	TAHU 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	N/A	N/A	N/A	3.760.000,00	3.758.500,00	99,96	5.020.000,00	4.803.500,00	95,69	6.270.000,00	6.267.000,00	99,95	5.520.000,00	5.472.000,00	99,13
Pemeliharaan rutin berkala software dan sistem informasi	N/A	N/A	N/A	53.440.000,00	52.284.940,00	97,84	158.645.000,00	158.088.903,00	99,65	30.000.000,00	29.527.000,00	98,42	67.370.000,00	66.425.696,00	98,60
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26.100.000,00</b>	<b>26.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	26.100.000,00	26.100.000,00	100,00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	N/A	N/A	N/A	<b>223.722.000,00</b>	<b>222.327.400,00</b>	<b>99,38</b>	<b>258.482.000,00</b>	<b>252.319.544,00</b>	<b>97,62</b>	<b>485.288.000,00</b>	<b>477.480.884,00</b>	<b>98,39</b>	<b>192.137.500,00</b>	<b>189.893.317,00</b>	<b>98,83</b>
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	173.748.000,00	172.353.400,00	99,20	137.283.000,00	132.706.000,00	96,67	229.515.000,00	228.225.988,00	99,44	71.133.500,00	69.294.500,00	97,41
Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	N/A	N/A	N/A	49.974.000,00	49.974.000,00	100,00	121.199.000,00	119.613.544,00	98,69	255.773.000,00	249.254.896,00	97,45	121.004.000,00	120.598.817,00	99,67

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Program dan Kegiatan	TAHU 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	N/A	N/A	7.000.000,00	6.547.000,00	93,53	7.000.000,00	6.984.000,00	99,77	16.276.000,00	16.008.000,00	98,35	4.856.000,00	4.856.000,00	100,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	N/A	N/A	N/A	7.000.000,00	6.547.000,00	93,53	7.000.000,00	6.984.000,00	99,77	16.276.000,00	16.008.000,00	98,35	4.856.000,00	4.856.000,00	100,00
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	N/A	N/A	N/A	22.028.000,00	21.987.500,00	99,82	16.000.000,00	15.969.500,00	99,81	49.918.000,00	49.769.500,00	99,70	37.383.344,00	35.568.105,00	95,14
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	N/A	N/A	N/A	22.028.000,00	21.987.500,00	99,82	16.000.000,00	15.969.500,00	99,81	49.918.000,00	49.769.500,00	99,70	37.383.344,00	35.568.105,00	95,14
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	N/A	N/A	N/A	493.356.000,00	418.504.174,00	84,83	570.367.500,00	507.938.750,00	89,05	861.810.000,00	782.138.053,00	90,76	440.185.000,00	422.163.410,00	95,91
Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	N/A	N/A	N/A	80.507.000,00	76.485.450,00	95,00	81.804.500,00	73.271.000,00	89,57	81.654.500,00	54.875.721,00	67,20	-	-	-

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Program dan Kegiatan	TAHU 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pengembangan potensi unggulan daerah	N/A	N/A	N/A	105.541.000,00	104.321.500,00	98,84	55.000.000,00	52.289.000,00	95,07	203.970.000,00	196.802.500,00	96,49	123.970.000,00	122.308.800,00	98,66
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	46.968.000,00	44.258.410,00	94,23	42.790.500,00	39.647.537,00	92,65	83.410.000,00	80.549.782,00	96,57	87.906.500,00	79.685.126,00	90,65
Pengawasan dan evaluasi kinerja Badan Penanaman Modal Daerah	N/A	N/A	N/A	72.065.000,00	17.920.963,00	24,87	56.482.500,00	43.904.300,00	77,73	75.836.000,00	74.137.521,00	97,76	-	-	-
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	65.310.000,00	61.509.150,00	94,18	60.000.000,00	41.564.178,00	69,27	71.242.500,00	66.009.000,00	92,65	49.706.000,00	44.174.018,00	88,87
Penyelenggaraan pameran investasi	N/A	N/A	N/A	89.465.000,00	86.568.141,00	96,76	240.790.000,00	233.737.335,00	97,07	313.927.000,00	278.139.279,00	88,60	154.902.500,00	153.056.472,00	98,81
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	N/A	N/A	N/A	33.500.000,00	27.440.560,00	81,91	33.500.000,00	23.525.400,00	70,23	31.770.000,00	31.624.250,00	99,54	23.700.000,00	22.938.994,00	96,79
<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>602.709.500,00</b>	<b>593.369.815,00</b>	<b>98,45</b>	<b>711.724.000,00</b>	<b>690.303.464,00</b>	<b>96,99</b>	<b>1.003.304.000,00</b>	<b>968.091.770,00</b>	<b>96,49</b>	<b>560.263.000,00</b>	<b>554.427.554,00</b>	<b>98,96</b>
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	516.622.000,00	512.622.644,00	99,23	625.559.000,00	618.111.221,00	98,81	806.389.000,00	784.031.867,00	97,23	498.513.000,00	497.174.274,00	99,73

Rencana Strategis  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
 Periode 2021-2026

Program dan Kegiatan	TAHU 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Kajian kebijakan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	86.087.500,00	80.747.171,00	93,80	86.165.000,00	72.192.243,00	83,78	196.915.000,00	184.059.903,00	93,47	61.750.000,00	57.253.280,00	92,72
<b>Program Penanganan Pengaduan di Bidang Investasi dan Perijinan</b>	N/A	N/A	N/A	25.765.000,00	12.470.000,00	48,40	35.450.000,00	33.357.283,00	94,10	34.760.000,00	33.604.360,00	96,68	19.985.000,00	15.789.570,00	79,01
Fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan	N/A	N/A	N/A	25.765.000,00	12.470.000,00	48,40	35.450.000,00	33.357.283,00	94,10	34.760.000,00	33.604.360,00	96,68	19.985.000,00	15.789.570,00	79,01
<b>Jumlah Anggaran</b>	N/A	N/A	N/A	2.742.500.000,00	2.599.516.222,00	94,79	2.933.509.200,00	2.803.092.551,00	95,55	5.747.440.000,00	4.288.960.243,00	74,62	2.532.075.000,00	2.493.222.659,00	98,47

### 2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPMPPTSP KABUPATEN PEMALANG

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan OPD yang lebih baik, sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 2.8**

**Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

TANTANGAN	PELUANG
<b>DATA DAN INFORMASI</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi peluang dan daya dukung investasi</li> <li>2. Penyediaan sarana sistem informasi penanaman modal yang informatif, komunikatif, komprehensif dan update</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program updating data potensi investasi yang dapat ditawarkan</li> <li>2. Ketersediaan Kawasan Peruntukan Industri</li> <li>3. Ketersediaan infrastruktur pusat dan daerah sebagai daya tarik penanaman modal</li> <li>4. Ketersediaan SDM pendukung investasi</li> <li>5. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat</li> </ol>
<b>PROMOSI DAN PEMASARAN PENANAMAN MODAL</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan kapasitas DPMPPTSP dalam mengidentifikasi target promosi atau calon investor (intelephant market)</li> <li>2. Keterbatasan tindak lanjut pelayanan terhadap calon investor setelah promosi penanaman modal dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi daerah untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Bergasmalang sebagai proyek strategis nasional</li> <li>2. Pengembangan bidang usaha prioritas (Implementasi UU Cipta Kerja)</li> <li>3. Peningkatan kerjasama dengan lembaga promosi investasi dalam dan luar negeri</li> </ol>
<b>PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang semakin tinggi</li> <li>2. Belum terintegrasi dan terpadunya pelayanan perizinan baik pusat, daerah, BUMN/BUMD/ Swasta dalam satu tempat</li> <li>3. Kesetaraan gender dalam pelayanan penanaman modal</li> <li>4. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan regulasi perizinan</li> <li>5. Implementasi pemberian insentif bagi investor</li> <li>5. Keterbatasan sumberdaya manusia dibandingkan dengan beban kerja yang dihadapi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pembangunan Mal Pelayanan Publik</li> <li>2. Penyesuaian regulasi daerah terkait pelayanan perizinan berbasis resiko (Implementasi UU Cipta Kerja)</li> <li>3. Pelayanan kemudahan legalitas bagi UMKM (Inplemantasi UU Cipta kerja)</li> </ol>

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL**

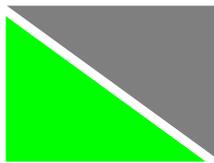
1. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha untuk memberikan LKPM tepat waktu	1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan OPD terkait
2. Minimalisasi konflik kepentingan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun lingkungan terkait penanaman modal	
3. Tidak terkendalinya harga tanah pada Kawasan Peruntukan Industri	

**2.4. ANALISIS SWOT**

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal dengan didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

**Tabel 2.9**  
**Analisis SWOT**

<p><b>ISU STRATEGIS</b></p>	<p><b>KEKUATAN (STRENGHT)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Potensi peluang investasi di berbagai sektor dan daya dukung investasi di Kabupaten Pemalang</li> <li>Ditetapkannya Kawasan Peruntukan Industri melalui Perda Kabupaten Pemalang No 1 Tahun 2018 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018-2038</li> <li>Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi investasi (gerai investasi)</li> </ol>	<p><b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Data dan informasi terkait potensi dan peluang investasi belum memadai</li> <li>Kapasitas pengelolaan sarana dan prasarana sistem informasi penanaman modal yang informatif, komunikatif, komprehensif dan update</li> <li>Belum terintegrasi dan terpadunya pelayanan perizinan pusat, daerah, BUMN/BUMD dan swasta dalam satu tempat</li> <li>Belum diimplementasikannya pemberian insentif bagi investor</li> </ol>
<p><b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sebagai media promosi investasi</li> <li>Dukungan pemerintah melalui terbitnya UU Cipta Kerja</li> <li>Pembangunan Mal Pelayanan Publik</li> <li>Koordinasi pengendalian dan pengawasan penanaman modal dengan OPD terkait</li> <li>Peningkatan kerjasama dengan lembaga promosi investasi luar daerah</li> </ol>	<p><b>STRATEGI SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan promosi penanaman modal</li> <li>Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal</li> </ol>	<p><b>STRATEGI WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</li> <li>Peningkatan pelayanan penanaman modal</li> </ol>
<p><b>TANTANGAN (THREAT)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan dalam mengidentifikasi target promosi atau calon investor (Intelegent Market)</li> <li>Masih adanya konflik kepentingan baik sosial ekonomi maupun lingkungan dalam pelaksanaan penanaman modal</li> <li>Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha untuk memberikan pelaporan kegiatan usaha dan pekungannya tepat waktu</li> <li>Tidak terkendalinya harga tanah pada Kawasan Peruntukan Industri</li> </ol>	<p><b>STRATEGI ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal</li> </ol>	<p><b>STRATEGI WT</b></p>



## **BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DPMPSTP**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal tahun 2021-2026 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi Penanaman Modal di Kabupaten Pemalang. Kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026. Ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan rencana kerja dan rencana strategis periode sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2021-2026.

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
<b>I</b>	<b>PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BELUM OPTIMAL DAN KURANG MERATA</b>		
	Belum optimalnya perkembangan dan pertumbuhan investasi	Belum optimalnya pemberian informasi daya tarik investasi daerah	Belum memadainya data dan informasi terkait profil potensi dan peluang investasi
			Belum memadainya data dan informasi terkait lahan dan peta kawasan peruntukan industri
			Belum memadainya data dan informasi terkait infrastruktur pendukung
			Belum memadainya data dan informasi terkait ketenagakerjaan
			Belum optimalnya kegiatan promosi dan pemasaran penanaman modal
		Iklim investasi yang belum sepenuhnya mendukung	Belum terintegrasi dan terpadunya pelayanan perizinan pusat, daerah, BUMN/BUMD dan swasta dalam satu tempat
			Belum diimplementasikannya pemberian insentif bagi investor
			Belum semua kebijakan daerah menyesuaikan dengan regulasi yang baru
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat UMKM untuk mendaftarkan usahanya
		Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Masih adanya konflik kepentingan baik sosial ekonomi maupun lingkungan dalam pelaksanaan penanaman modal
			Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha untuk memberikan pelaporan kegiatan usaha dan pekungannya tepat waktu
			Belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tentang pengisian dan penyampaian LKPM
			Tidak terkendalinya harga tanah pada Kawasan Peruntukan Industri

### **3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu :  
**"TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI"**

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut :

**Adil**, Keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

**Makmur**, Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

**Agamis**, Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

**Ngangeni**, Kondisi Kabupaten Pemalang yang adil makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. "*Pemalang itu ngangeni*".

Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang dominan terdapat dalam **Misi ke lima** yaitu :

**MISI 5 “Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal”**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan : DEWI = Desa Wisata , KOIN= Kota Industri).

Dari Misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2.**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang**

NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Misi 5 : Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Penyediaan data dan informasi tentang peluang dan daya dukung investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesenjangan antara penawaran yaitu potensi dan peluang investasi yang ditawarkan dengan permintaan investasi yang diminta investor</li> <li>2. Kemampuan pengelolaan sarana sistem informasi penanaman modal yang informatif, komunikatif, komprehensif dan update</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutahiran data dan informasi tentang peluang dan daya dukung investasi</li> <li>2. Tersedianya sistem informasi tata ruang (Lintas OPD)</li> <li>3. Tersedianya sistem informasi gerai investasi</li> </ol>
			Optimalisasi kegiatan promosi dan pemasaran investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas pengelolaan sarana dan prasarana sistem informasi penanaman modal yang informatif, komunikatif, komprehensif dan update</li> <li>2. Keterbatasan dalam mengidentifikasi target promosi atau calon investor (Intelegent Market)</li> <li>3. Keterbatasan dalam kegiatan kerjasama atau temu bisnis dalam pemasaran investasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kerjasama dengan lembaga promosi investasi luar daerah</li> </ol>

NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			Sinkronisasi pelayanan perizinan dan non perizinan antara Pusat, Daerah, BUMN/BUMD dan swasta dalam satu tempat	1. Belum adanya sarana dan prasarana perizinan terintegrasi dan terpadu dalam satu tempat	1. Pembangunan Mal Pelayanan Publik 2. Sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah 3. Program Unggulan Kota Industri (KOIN)
			Optimalisasi kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1. Tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk memberikan pelaporan kegiatan usaha dan pekungbangannya tepat waktu	1. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tentang pengisian dan penyampaian LKPM

### 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Terkait pelaksanaan program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat tiga Kementerian yang terlibat secara langsung dalam tata kelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, yaitu

#### 3.3.1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah :

**“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumberdaya aparatur Yang Profesional dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berada pada Direktorat Pembangunan Daerah dengan Visi :

**“Mengembangkan hubungan keserasian pusat daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah secara berkelanjutan”**

Dengan strategi pencapaian program dalam koridor kebijakan strategis yaitu Mendorong Penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi. Bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dibutuhkan pelayanan publik yang dapat mendorong peningkatan investasi dalam rangka mendorong angka pertumbuhan ekonomi di daerah.

### **3.3.2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia**

Visi yang dirumuskan adalah :

**“Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani”**

Agar pencapaian dapat dilakukan secara maksimal maka ditetapkan sasaran strategis yang terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya dan yang menjadi indikator utamanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata nasional 80.

Peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui rencana aksi :

1. Peningkatan Pelayanan Perizinan :
  - a. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan
  - b. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan
    - Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    - Pembatasan Waktu Pengurusan Izin.
2. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui :
  - a. Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerahdaerah);
  - b. Peningkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda;
  - c. Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
  - d. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

### **3.3.3. Kementrian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia**

Visi yang dirumuskan adalah :

**“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

Misi (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

Misi (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Sementara itu BKPM juga diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs),
- b) Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
- c) Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal
- d) Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal,
- e) Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal,
- f) Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal,
- g) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

2) Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
- b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal
- c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi,
- d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar
- e) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor,
- f) Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar
- g) Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri

### **3.3.4. Peraturan Presiden No 79 Tahun 2020**

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 79 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang. Dalam Peraturan Presiden No 79 Tahun 2021, dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Bregasmalang ( Brebes – Tegal – Pemalang ) di Kabupaten Pemalang telah diusulkan program/kegiatan Pembangunan Kawasan Energi Terpadu dengan estimasi nilai investasi sebesar 1.000.000.000.000 dan sumber dana swasta murni. Tindak lanjut DPMPTSP terkait dengan Pembangunan Kawasan Energi ini adalah DPMPTSP berperan dalam fasilitasi perijinannya.

### **3.3.5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan realisasi penanaman modal dalam mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan
2. Meningkatnya realisasi capaian PMA dan PMDN

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. Misi Ke-2 yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Strategi :

- Membangun open government melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
  - Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja;
  - Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP, perkuatan SPIP, serta zona integritas;
  - Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
  - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
  - Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).
2. Misi Ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- Tujuan : Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan secara menyebar, inklusif, dan berkualitas.
- Strategi : Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui:
- Pemberian kemudahan perizinan investasi
  - Memperbaiki sistem dan layanan perizinan mudah, murah, cepat, tepat, dan transparan;
  - Mengembangkan digital investment promotion;
  - Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota;
  - Mendorong perwujudan investasi hijau.

### **3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038, kegiatan penanaman modal sangat erat kaitannya dengan peruntukan ruang baik itu dari segi struktur maupun

pola ruang kawasan yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi penanaman modal.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah yang berpengaruh terhadap kegiatan penanaman modal adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

No	Rencana Pola Ruang	Arahan Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
1	Kawasan hutan lindung	Luas 5.395 ha meliputi : 1. Kecamatan Bantarbolang 2. Kecamatan Belik 3. Kecamatan Moga 4. Kecamatan Pulosari 5. Kecamatan Watukumpul	1. Pelestarian lingkungan hidup	1. Pengendalian kegiatan penanaman modal yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
2	Kawasan perlindungan setempat	1. Sempadan pantai 2. Sempadan sungai 3. Sempadan saluran irigasi 4. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	1. Pelestarian lingkungan hidup setempat	1. Pengendalian kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat
3	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Cagar Alam : 1. CA Bantarbolang 2. CA Moga 3. CA Curug Bengkawah Cagar Budaya : 1. Situs Plawangan 2. Gedung dan makam	1. Pelestarian suaka alam dan cagar budaya	1. Pengendalian kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan umum zonasi kawasan suaka cagar alam, pelestarian alam dan cagar budaya
4	Kawasan Peruntukan Industri	1. Luas 1.909 ha	1. Mengarahkan kegiatan industri dalam Kawasan Peruntukan Industri	1. Pengendalian kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan zonasi Kawasan Peruntukan Industri

### 3.5. TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan /atau kebijakan, rencana dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan ;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan / jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Data KLHS Kabupaten Pemalang sangat berpengaruh hubungannya dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam menentukan program dan kegiatan beserta targetnya untuk lima tahun kedepan sehingga pencapaian kinerjanya akan sesuai dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program Pemerintah Kabupaten Pemalang.

### **3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

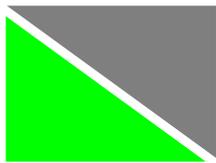
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, yaitu dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka isu-isu strategis yang berdampak pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, adalah :

1. Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investasi yang ada di Kabupaten Pemalang ;

2. Belum adanya kemudahan pelayanan perizinan untuk investor yang terintegrasi dalam Mal Pelayanan Publik

Dengan adanya isu strategis tersebut maka DPMPTSP Kabupaten Pemalang menindaklanjutinya dengan penyusunan Program dan Kegiatan termasuk target capaian masing-masing indikatornya selama lima tahun.



## **BAB 4**

# **TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN PEMALANG**

Berdasarkan cita-cita pembangunan daerah Kabupaten Pemalang periode 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang diamanatkan untuk mendukung dan mensukseskan Misi RPJMD yang ke 5 (Lima) yaitu **Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal.** Dengan demikian seluruh kerangka kerja logis urusan penanaman modal mulai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, berikut indikator kinerjanya ditujukan untuk mendukung dan mensukseskan misi kelima tersebut. Misi kelima RPJMD Kabupaten Pemalang tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dalam kemandirian ekonomi daerah dan sasaran yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten pemalang adalah adalah meningkatnya realisasi investasi.

Dari tujuan dan sasaran RPJMD terkait misi kelima tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa tujuan dan sasaran di tingkat DPMPTSP Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

**Tujuan : Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN**

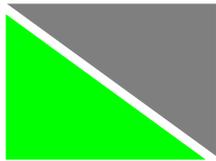
**Sasaran : 1. Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN**  
**2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perijinan**

Dari tujuan dan sasaran tersebut, indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang untuk Urusan Penanaman Modal dalam 5 Tahun mendatang adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**

**Tujuan dan Sasaran Pelayanan DPMPSTP Kabupaten Pemalang**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Realisasi PMA dan PMDN	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	-90,5%	1%	2%	3%	4%	5%	<b>6%</b>
		Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,6	83,6	83,8	84,0	84,2	84,4	<b>84,6</b>



## **BAB 5**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

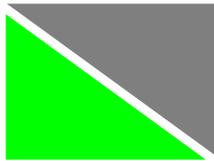
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kabupaten Pemalang merupakan satu kesatuan dari rangkaian kerangka kerja logis mulai dari pendekatan top down (visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang) dan pendekatan bottom up (isu strategis) dimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya keterkaitan antara misi ke lima Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang terkait dengan urusan dan kewenangan DPMPTSP Kabupaten Pemalang ke dalam tujuan dan sasaran Renstra.

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI</b>			
<b>Misi : Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi pemberian insentif penanaman modal</li> <li>2. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global dengan mengutamakan potensi unggulan daerah</li> </ol>
		Peningkatan pemberian informasi peta potensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutahiran data dan informasi terkait profil potensi, peluang dan daya dukung investasi</li> </ol>
		Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kegiatan temu bisnis untuk membuka peluang investasi skala regional dan nasional</li> <li>2. Peningkatan kerjasama dengan lembaga promosi investasi luar daerah</li> </ol>
		Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tentang pengisian dan penyampaian LKPM</li> <li>2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal</li> <li>3. Akselerasi pelaporan kinerja PMA dan PMDN</li> </ol>

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemutahiran data dan informasi tentang perizinan dan non perizinan</li><li>2. Digitalisasi proses pelayanan perizinan</li></ol>
		Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyesuaian regulasi daerah terkait perizinan melalui peningkatan penyederhanaan perizinan</li><li>2. Peningkatan kualitas pelayanan melalui kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan</li></ol>



## **BAB 6**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, DPMPTSP Kabupaten Pemalang menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026. Program DPMPTSP Kabupaten Pemalang merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu indikatifnya sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh DPMPTSP sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi DPMPTSP Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - 1) Penetapan pemberian fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- b. Program Promosi Penanaman Modal
  - 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
  - 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  - 1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program, dan Kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang**

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lok asi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN		Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah investor	-35,87%	2,95%	200,651	3,00%	200,651	3,05%	200,00	3,10%	205,000	3,15%	210,00	3,20%	215,000		
			Kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	100%	100%	85,000	100%	85,000	100%	84,349	100%	89,349	100%	94,349	100%	84,349		
			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah regulasi yang tersusun	1	2	66,000	2	66,000	2	66,000	2	70,349	2	75,349	2	66,000		

Rencana Strategis  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
 Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah movev perusahaan yang dilakukan(kegiatan movev)		22	19,000	3	19,000	20	18,349	22	19,000	22	19,000	20	18,349		
			Kegiatan pembuatan peta investasi Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi investasi	100%	100%	115,651	100%	115,651	100%	115,651	100%	115,651	100%	115,651	100%	130,651		
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan umum penanaman modal yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000			0		0		0		1 Dokumen	20,000		
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kajian peta potensi dan peluang usaha yang terlaksana	4 Dokumen	1 Kegiatan	95,651	1 Kegiatan	115,651	1 Dokumen	110,651								
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal	100%	100%	152,000	100%	212,000	100%	212,000	100%	215,000	100%	215,000	100%	220,000		

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai investasi	166.492,408	168.157,332081	152,000	171.520,479	212,000	176.666,093	212,000	183.732,737	215,000	192.919,374	215,000	204.494,536	220,000			
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian strategis promosi penanaman modal yang tersusun	0	0	1 Dokumen	60,000	1 Dokumen	60,000										
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penanaman modal yang terlaksana	2 Kegiatan Promosi	1 Kegiatan Promosi	152,000	1 Kegiatan Promosi	152,000	1 Kegiatan Promosi	152,000	1 Kegiatan Promosi	155,000	1 Kegiatan Promosi	155,000	1 Kegiatan Promosi	160,000			
			Program pelayanan penanaman modal	Persentase terselenggarannya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	98,02%	95%	544,380	95%	599,320	96%	6.000,000	96%	4.000,000	97%	1.020,000	97%	1.050,000			

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perizinan yang disetujui		100%	544,380	100%	599,320	100%	6.000,000	100%	4.000,000	100%	1.020,000	100%	1.050,000		
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah ijin terbit yang terpenuhi	6.292 Izin Terbit	5.000 Izin Terbit	312,878	5.250 Izin Terbit	367,818	5.500 Izin Terbit	5.768,498	5.750 Izin Terbit	3.768,498	6.000 Izin Terbit	788,498	6.250 Izin Terbit	818,498		
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah cek lokasi yang terlaksana	0	240 kali kegiatan cek lokasi	112,502	240 kali kegiatan cek lokasi	112,502	240 kali kegiatan cek lokasi	112,502	240 kali kegiatan cek lokasi	112,502	240 kali kegiatan cek lokasi	112,502	240 kali kegiatan cek lokasi	112,502		

Rencana Strategis  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
 Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengolahan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang terlaksana	5 layanan pengaduan	4 layanan pengaduan	19,000	4 layanan pengaduan	19,000	4 layanan pengaduan	19,000	4 layanan pengaduan	19,000	4 layanan pengaduan	19,000	4 layanan pengaduan	19,000		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	0	75 kali koordinasi	100,000	75 kali koordinasi	100,000	75 kali koordinasi	100,000	75 kali koordinasi	100,000	75 kali koordinasi	100,000	75 kali koordinasi	100,000		
			Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	27,61%	40%	452,462	42%	452,462	44%	452,462	46%	455,000	48%	460,000	50%	465,000		

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	100%	452,462	100%	452,462	100%	452,462	100%	455,000	100%	460,000	100%	465,000		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	54 Kali (Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan)	22 Kali Pemantauan	85,820	22 Kali Pemantauan	85,820	22 Kali Pemantauan	85,820	22 Kali Pemantauan	85,820	8 Kali Pemantauan	85,820	8 Kali Pemantauan	85,820		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana		9 Kali Pembinaan	272,262	9 Kali Pembinaan	272,262	9 Kali Pembinaan	272,262	9 Kali Pembinaan	274,800	9 Kali Pembinaan	274,800	10 Kali Pembinaan	279,800		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana		13 Kali Pengawasan	94,380	13 Kali Pengawasan	94,380	13 Kali Pengawasan	94,380	13 Kali Pengawasan	94,380	14 Kali Pengawasan	99,380	14 Kali Pengawasan	99,380		

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase realisasi perizinan	157,30%	100%	27,277	100%	27,277	100%	27,277	100%	30,000	100%	35,000	100%	40,000		
			Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tersusunnya data/ informasi perizinan	0	100%	27,277	100%	27,277	100%	27,277	100%	30,000	100%	35,000	100%	40,000		
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data/ informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	0	1 Data/ Informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	27,277	1 Data/ Informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	27,277	1 Data/ Informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	27,277	1 Data/ Informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	30,000	1 Data/ Informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	35,000	1 Data/ Informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	40,000		

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	Persentase terwujudnya urusan pemerintahan daerah	100%	100%	7.994,998	100%	6.979,199	100%	6.979,199	100%	6.979,199	100%	6.979,199	100%	6.979,199		
			Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	133,000	100%	346,321	100%	346,321	100%	346,321	100%	346,321	100%	346,321		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	110 Buku	2 Dokumen	35,000	2 Dokumen	135,000	2 Dokumen	135,000								
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	0	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	0	1 Dokumen	8,000	1 Dokumen	8,520	1 Dokumen	8,520								
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	0	1 Dokumen	6,500	1 Dokumen	6,500	1 Dokumen	6,500	1 Dokumen	6,500	1 Dokumen	6,500	1 Dokumen	6,500		

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKDP yang disusun	0	1 Dokumen	6,500	1 Dokumen	7,380	1 Dokumen	7,380								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	0	1 Dokumen	7,000	1 Dokumen	7,000	1 Dokumen	7,000	1 Dokumen	7,000	1 Dokumen	7,000	1 Dokumen	7,000		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	0	2 Dokumen	60,000	2 Dokumen	171,921	2 Dokumen	171,921								
			<b>Kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.778,106</b>	<b>100%</b>	<b>3.787,928</b>	<b>100%</b>	<b>3.787,928</b>	<b>100%</b>	<b>3.787,928</b>	<b>100%</b>	<b>3.787,928</b>	<b>100%</b>	<b>3.787,928</b>		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	0	26 OB	3.549,306	26 OB	3.559,128	26 OB	3.559,128	24 OB	3.559,128	24 OB	3.559,128	24 OB	3.559,128		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penanggungjawab pengelolaan keuangan SKPD setiap bulan	0	13 OB	210,840	13 OB	210,840	13 OB	210,840	13 OB	210,840	13 OB	210,840	13 OB	210,840		

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	20 Buku	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000	1 Dokumen	10,000		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	0	2 Dokumen	7,960	2 Dokumen	7,960	2 Dokumen	7,960	2 Dokumen	7,960	2 Dokumen	7,960	2 Dokumen	7,960		
			<b>Kegiatan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>138,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,000</b>	<b>100%</b>	<b>15,000</b>		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah gedung yang terjaga keamanannya	12 Bulan	1 gedung	138,000												
			Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan penataan barang daerah SKPD yang dilaksanakan	0	0	-	1 Laporan	10,000	1 Laporan	15,000								
			<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi Pendapatan Daerah SKPD</b>		<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>10,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,000</b>	<b>100%</b>	<b>15,000</b>		

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pelaporan retribusi daerah yang dilaksanakan		0	-	1 Laporan	10,000	1 Laporan	15,000								
			Kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	180,546	100%	331,161	100%	331,161	100%	331,161	100%	331,161	100%	331,161		
			Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapan yang disediakan	60 stel	0	0	65 stel	42,250	65 stel	42,250								
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan perundang-undangan	4 jenis/kegiatan	180 Orang	70,140	180 Orang	70,140	180 Orang	70,140	180 Orang	70,140	180 Orang	70,140	180 Orang	70,140		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	23 Orang	60 Orang	110,406	120 Orang	218,771	120 Orang	218,771								
			Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	410,321	100%	818,268	100%	818,268	100%	818,268	100%	793,268	100%	1.005,912		

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen listrik yang dibeli	12 Bulan	12 Bulan	11,800	12 Bulan	23,600	12 Bulan	30,000								
			Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0	0	-	12 Bulan	10,000	12 Bulan	30,000								
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor yang dipenuhi	12 Bulan	2 Jenis/bulan	179,894	2 Jenis/bulan	179,894	2 Jenis/bulan	179,894	2 Jenis/bulan	179,894	2 Jenis/bulan	179,894	2 Jenis/bulan	359,788		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dipenuhi	12 Bulan	12 Bulan	40,016	12 Bulan	240,024	12 Bulan	240,024	12 Bulan	240,024	12 Bulan	215,024	12 Bulan	215,024		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dipenuhi	12 Bulan	12 Bulan	6,350	12 Bulan	6,350	12 Bulan	6,350	12 Bulan	6,350	12 Bulan	6,350	12 Bulan	12,700		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	0	51 Orang	1,280	255 Orang	6,400	255 Orang	6,400								
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	150 Kali	140 Kali	170,980	210 Kali	352,00	210 Kali	352,00								

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

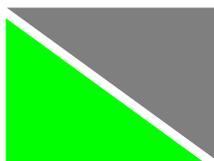
Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	600,000	100%	695,000	100%	695,000	100%	695,000	100%	720,000	100%	374,000		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	0	0	-	2 Unit	70,000	2 Unit	70,000	2 Unit	70,000	2 Unit	70,000	2 Unit	70,000		
			Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang dibeli	0	0	-	10 Unit	25,000	10 Unit	25,000	10 Unit	25,000	20 set meja kursi kerja	50,000	5 unit (4 kursi pengunjung, 1 set sofa)	54,000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	13 Unit	13 Unit	600,000	24 Unit	600,000	24 Unit	600,000	24 Unit	600,000	24 Unit	600,000	10 Unit	250,000		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	275,640	100%	413,640	100%	413,640	100%	413,640	100%	413,640	100%	518,365		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	5.500	5.500	110,915	5.500	110,915	5.500	110,915	5.500	110,915	5.500	110,915	5.500	110,915		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik, publikasi dan internet yang terpenuhi	12 Bulan	4 jenis/bulan	104,725	4 jenis/bulan	104,725	4 jenis/bulan	104,725	4 jenis/bulan	104,725	4 jenis/bulan	104,725	4 jenis/bulan	209,450		

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS setiap bulan	0	5 Orang/ Bulan	60,000	12 Orang/ Bulan	198,000	12 Orang/ Bulan	198,000								
			Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	2.479,386	100%	566,881	100%	566,881	100%	566,881	100%	566,881	100%	585,512		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang berizin dan dipelihara	12 Bulan (17 Unit)	1 Unit	72,910	1 Unit	122,910	1 Unit	122,910								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berizin dan dipelihara	0	21 unit	133,960	21 unit	183,960	21 unit	183,960								

Rencana Strategis  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
 Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			Rp. Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	0	0	-	15 Unit	50,000	15 Unit	50,000								
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	12 Bulan	15 unit	70,438	15 unit	71,138	15 unit	71,138								
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan (1 Gedung)	1 Gedung	2.174,638	1 Gedung	98,178	1 Gedung	116,809								
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	0	33 Unit	27,440	33 Unit	40,695	33 Unit	40,695								



## BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Kabupaten Pemalang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam RPJMD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Indikator kinerja tersebut dapat dicapai bila sumber daya organisasi dan asumsi–asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Berikut Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan:

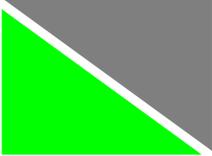
**Tabel 7.1.**

### Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN)	%	-90,5	1	2	3	4	5	<b>6</b>
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,6	83,6	83,8	84,0	84,2	84,4	<b>84,6</b>
3	Persentase peningkatan jumlah investor	%	-35,87	2,95	3,00	3,05	3,10	3,15	<b>3,20</b>
4	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	<b>100</b>
5	Persentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non peijinan penanaman modal	%	98,02	95	95	96	96	97	<b>97</b>
6	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan tepat waktu	%	27,61	40	42	44	46	48	<b>50</b>

Rencana Strategis  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang  
 Periode 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Persentase realisasi perizinan	%	157,3	100	100	100	100	100	<b>100</b>
9	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMAI)	jumlah	34	35	36	37	38	39	<b>40</b>
10	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	166.492	168.157	171.520	176.666	183.732	192.919	<b>204.494</b>



## **BAB 8**

# **PENUTUP**

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan penanaman modal yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang untuk periode 5 tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi daerah Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Pemalang dan menjadi acuan resmi penilaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan RKA DPMPTSP Kabupaten Pemalang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang.

Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DPMPTSP Kabupaten Pemalang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dan atau target kinerja sasaran DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

Pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA DPMPTSP Kabupaten Pemalang harus ditingkatkan. Hasil dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Pemalang. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra DPMPTSP Kabupaten Pemalang ini.

Pemalang, 24 September 2021

**Kepala Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pemalang**



*[Handwritten Signature]*  
**Khaeron, SH, MM**  
NIP. 19680323 199003 1 012